

LAPORAN
PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Daftar Isi

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana Aksi

D. PENUTUP

LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN III Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

b. Manfaat

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

- a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Publik

- a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
- b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Pentingnya Responsibilitas Dalam Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Senin

Tanggal : 30 Maret 2026

b. Tempat Pelaksanaan

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten pasuruan.

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan.

b. Peserta FKP

Seluruh Relawan PB (Penanggulangan Bencana) Se Kabupaten Pasuruan, FPRB, Akademisi, Media, Pusdalops

3. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara tatap muka

4. Susunan Acara FKP

Jam	Kegiatan	Keterangan
08.00-08.30	Registrasi peserta	
08.30-09.00	Sambutan dan pembukaan Kepala Pelaksana BPBD	Dipandu MC
09.00-10.00	Pemaparan dari Bidang Pelayanan /pengampu tugas dan kewenangan tema dari pelaksanaan FKP	
10.00-11.00	Tanggapan dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut	
11.00-30	Penanda tanganan berita acara FKP	
11.30	Penutupan.	

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Terdapat 3 aspirasi dari peserta rapat yaitu:

- Penyusunan Standart Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dikarenakan perubahan struktur organisasi pada BPBD.
- Meningkatkan Integrasi dan Koordinasi dengan stakeholder terkait dan penambahan nasi bungkus saat penyaluran logistic bantuan bencana serta koordinator shelter lebih terstruktur.
- Bagaimana mengatasi luapan air disisi hilir dan memastikan aliran DAS tidak berhenti.

2. Analisis

- Penyampaian Penyusunan Standart Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan disesuaikan dengan Peraturan Bupati nomor 56 Tahun 2025

- b. Kebutuhan untuk penanganan bencana terutama banjir belum sepenuhnya mendapatkan nasi bungkus dan akan ditindak lanjuti dan koordinasi dengan stakeholder terkait.
- c. Akan lebih berkoordinasi dengan stakeholder / OPD terkait.

3 Rencana Aksi

- a. Stakeholder telah menyepakati Standart Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) BPBD.
- b. Kedepannya akan lebih berkoordinasi dengan stakeholder terkait , BPBD akan lebih dievaluasi lagi untuk koordinasi penanganan shelter.
- c. Akan lebih berkoordinasi dengan stakeholder / OPD terkait.

D. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait reviu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ini, maka Asdep Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat berkomitmen untuk :

- 1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP.
- 2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia;
- 3) Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapat membantu Asdep PPM dalam reviu pedoman terkait SKM.



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Raya Bendungan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. 67151

Pos-el bpbd pasuruankab.go.id, Pos-el : bpbd@pasuruankab.go.id

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Pada hari ini Senin, 30 Maret 2026, telah dilaksanakan forum konsultasi publik sektor pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan hasil diskusi dan Keputusan Bersama menyatakan sebagai berikut:

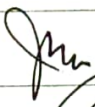
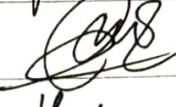
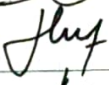
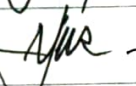
No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Penyusunan Standart Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dikarenakan perubahan struktur organisasi pada BPBD.	Stakeholder telah menyepakati Standart Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) BPBD.	Anggaran tahun berjalan 2026
2.	Kurangnya Integrasi dan Koordinasi dengan stakeholder terkait dan penambahan nasi bungkus saat penyaluran logistic bantuan bencana serta koordinator shelter lebih terstruktur	Kedepannya akan lebih berkoordinasi dengan stakeholder terkait, BPBD akan lebih mengevaluasi lagi untuk koordinasi penanganan shelter	Anggaran tahun berjalan 2026
3.	Permasalahan luapan air disisi hilir dan memastikan aliran DAS tidak berhenti.	Akan lebih berkoordinasi dengan stakeholder / OPD terkait	Anggaran tahun berjalan 2026

Pimpinan unit penyelenggara dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati Bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kabupaten Pasuruan, 30 Maret 2026

No.	NAMA & NO HP*	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
1.	Drs. Amang Fatkhurrohman Hp. 0856 5556 7588	L	Universitas NU Pasuruan	
2.	Aris Felani Hp. 0857 3226 5105	L	FPRB / LPBI NU Kabupaten Pasuruan	
3.	Darnan Hp. 0852 3347 7800	L	Relawan PB LPBI Kecamatan Lumbang	
4.	M. Nasrudin	L	Media LPBI NU dan FPRB	

*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP dan wajib mencantumkan nomor kontak/HP

Pimpinan
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan



SUGENG HARIYADI, SE.,MM.
NIP. 19671214 198901 1 002

Pimpinan
Penyelenggara Pelayanan



Dimaz Kris Asmoro, ST., MM
NIP. 19810707 200901 1 008

*) Penandatanganan adalah Pimpinan Instansi dan Penyelenggara Pelayanan.

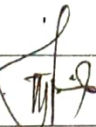
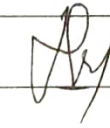
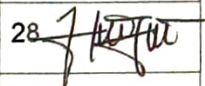
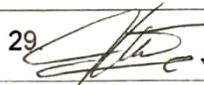
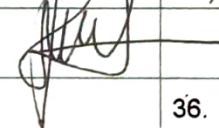
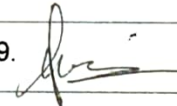
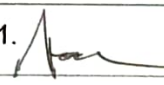
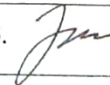
DAFTAR HADIR

Hari /tanggal : Senin, 30 Maret 2026.

Acara : Forum Konsultasi Publik "Penanganan Bencana Hidrometeorologi Terintegrasi di Kabupaten Pasuruan"

Tempat : Ruang Rapat Lantai 1 BPBD Kabupaten Pasuruan.

NO	NAMA	JABATAN	L/P	TANDA TANGAN	
1.	SUGENG H	Kabid sa		1.	
2.	DIMAZ K	Secretaris			2.
3.	AHMAD SIDIQ	Kabid PK		3.	
4.	TEDDY W	Kabid KLR			4.
5.	Salamah Saadi	Kasubag		5.	
6.	Zaini Zahid Salsabila Mulya	Staf			6.
7.	Anang purnama	FPRB Universitas NU	L	7.	
8.	Briz Folar	PRB kab. pas	L		8.
9.	Wini n	Staf	L	9.	
10.	CHOIRUL ANAM	---	L		10.
11.	Eka Fitri T	Staf.	P	11.	
12.	Anang	Staf			12.
13.	Muyib	TRC		13.	
14.	Dorianto	Stat			14.
15.	Ali Mutis S	Staf	L	15.	
16.	Lailatul k	Staf.	P		16.
17.	M-RIFALIANIDAHU	Stat	L	17.	
18.	Suryan n	Stat	L		18.
19.	M. Nasrudin	FPRB Media	L	19.	
20.	Emmahar dora	---	P		20.

23.	Fahmi	Dalops	L	23.		
24.	Tri Anwar	Dalops	L			24. 
25.	Wahyu	Dalops	L	25.	Jaya	
26.	M-ROHMAT	PB				26. 
27.	DARMAN	PB		27.		
28.	HOJIN	PB.				28. 
29.	SLAMET Keres	PB		29.		
30.	NATH	PB				30. 
31.	ALfan	PB		31.		
32.	Haripadi	PB				32. 
33.	Vernando Rizky Ego-l.	PB.		33.	Heru.	
34.	M Ilham Endang	Dalops				34. 
35.	Imron R.	TRC		35.		
36.	Yannar Ego A.	Dalops				36. 
37.	Subauli	PK		37.		
38.	Muhammed Rasyid	Pusdalops				38. 
39.	Rizki K-nan	TRC		39.		
40.	Slomet Progitko	Agan				40. 
41.	Amy Bedi	Agan		41.		
42.	Salim	Pusdalops				42. 
43.	Tri Cahyan	KL	L	43.		
44.	yain	TRC				44. 
45.	Faza	Pus dalops		45.		
46.	Juandi	Pus dalops				46. 

50.	C. Amur	PB		50.	<i>Amur</i>
51.	M. Alfa	PB		51.	<i>Alfa</i>
52.	Bintang	PB		52.	<i>Bintang</i>
53.	Ilham Firdaus	PB		53.	<i>Ilham Firdaus</i>
54.	M. Bidi	PB		54.	<i>Bidi</i>
55.	Badar Samri	PB		55.	<i>Badar Samri</i>
56.				56.	
57.				57.	
58.				58.	
59.				59.	
60.				60.	
61.				61.	
62.				62.	
63.				63.	
64.				64.	
65.				65.	
66.				66.	
67.				67.	
68.				68.	
69.				69.	
70.				70.	



Kepala Pelaksana BPBD
Kab. Pasuruan

SUGENG HARIYADI S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP: 196712141989011002



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Raya Bendungan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. 67151

Pos-el bpbd pasuruankab.go.id, Pos-el : bpbd@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 27 Maret 2026

Nomor : 000.8.3.4/100/206/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. Terlampir
di
PASURUAN.

Sebagaimana Amanah dari Peraturan Menteri PANRB No 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standart Pelayanan serta Penyusunan Maklumat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kami akan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan tema: "Penanganan bencana Hidrometeorologi terintegrasi di Kabupaten Pasuruan" maka dimohon kehadiran Bapak/ Ibu pada :

Hari / Tanggal : Senin / 30 Maret 2026

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat BPBD lantai 1, Jl. Raya Bendungan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN PASURUAN



SUGENG HARIYADI, S.E., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP 196712141989011002

Lampiran

1. FPRB (2 orang)
2. Akademisi (1 orang)
3. Media (1 orang)
4. Relawan PS
5. Pustaklopi





PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Raya Bendungan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. 67151

Pos-el bpbdd pasuruankab.go.id, Pos-el : bpbdd@pasuruankab.go.id

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIC (FKP)
SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

Berdasarkan berita acara hasil forum konsultasi publik sektor pelayanan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten pasuruan yang telah ditanda tangani pada tanggal 19 Maret 2025. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang dilakukan antara lain:

No	Identifikasi Masalah	Rekomendasi dan target penyelesaian	Tindak lanjut	Penjelasan
1.	Menghimbau selalu kepada BPBD untuk informasi dan peta wilayah resiko bencana kekeringan, banjir, Gerak tanah di Kecamatan	Peta resiko bencana berdasarkan kajian resiko bencana bisa diakses langsung ke BPBD	Tersedianya peta bencana di ruang Diorama Tangguh BPBD	
			Anggaran 2025	
			Keterangan (dokumentasi) 	
2.	Respon cepat penanganan bencana baik penanganan kedaruratan maupun psaca bencana	Dapat mengakses informasi kebencanaan tentang kedaruratan maupun pasca bencana melalui link BPBD www.pasuruankab.go.id , pos-el bpbdd@pasuruankab.go.id , IG: bpbdd_kab_pasuruan	Perpanjangan pendirian posko bencana dan Pembangunan Shelter penanggulangan Bencana di tiga titik : Winongan , Rejoso dan Bangil	
			Anggaran 2025	
			Keterangan (dokumentasi)  1. Posko Relawan PB  2. Shelter Winongan	

			 3. Shelter Bangil  4. Shelter Rejoso	
3.	Standart pelayanan yang telah ditetapkan apakah masih relevan untuk digunakan saat ini atau perlu adanya perbaikan	Standart pelayanan yang telah ditetapkan masih relevan untuk digunakan, hanya diperlukan penyesuaian nomenklatur pejabat dari structural ke fungsional	Telah dilakukan perbaikan Anggaran 2025 Keterangan (dokumentasi) 	

*Dilengkapi dengan bukti-bukti tindak lanjut

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 30 Maret 2026

Pimpinan
Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pasuruan


SUGENG HARIYADI, SE.,MM.
NIP. 19671214 198901 1 002

Pimpinan
Penyelenggara Pelayanan

DIMAZ KRIS ASMORO, ST., MM
NIP. 198107072009011008